**Stabilisasi dan Harmonisasi Perekonomian Indonesia Pascakrisis 1998**

Terdapat dua masalah pokok yang menjadikan perekonomian Indonesia dengan mudah terkena dampak krisis moneter dari Thailand dengan mudah terkena dampak krisis moneter dari Thailand pada pertengahan 1997. Kedua hal tersebut adalah : (i) masalah internal system pasar; yaitu tingginya utang luar negeri swasta yang tidak di-hedge sehingga potensial untuk menjadi kredit macet jika terjadi gejolak kurs rupiah, dan (ii) masalah eksternal system pasar yang senantiasa membebani psikologi pasar.

Pada paruh kedua tahun 1997 Indonesia menyimpan tiga potensi krisis yang siap muncul setiap waktu, yaitu krisis moneter, politik, dan social. Karena hal tersebut, pasar bereaksi negatif, dan para pemain utamanya siap-siap menyelamatkan asset likuidnya ke luar negeri. Maka, ketika terjadi krisis moneter, yang ditandai dengan turunnya nilai rupiah, meningkatnya tingkat suku bunga perbankan, melonjaknya inflasi, macetnya kredit perbankan, menganggurnya kapasitas produksi, dan meningkatnya pengangguran tenaga kerja; hancurnya kestabilan ekonomi makro yang sudah mapan selama tiga dekade terakhir. Ekuilibrium umum perekonomian Indonesia pada waktu itu benar-benar rusak.

Meledaknya krisis moneter dan hancurnya kestabilan ekonomi makro segera berdampak pada krisis sosial dan politik pada waktu yang hampir bersamaan. Krisis sosial terjadi ketika masyarakat mulai melampiaskan dendam, kebencian, dan kecemburuan ekonomi, sosial, rasial, dan keagamaan. Konflik horizontal terjadi secara sporadis dimana-mana. Hubungan sosial masyarakat Indonesia yang plural hancur berantakan. Krisis politik terjadi karena masyarakat tidak lagi mempercayai kemampuan Presiden Soeharto dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial. Masyarakat juga menghendaki agar Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Hilangnya angkor kestabilan tersebut menjadikan situasi politik Indonesia semakin tidak stabil.

Dalam keadaan vakum nilai budaya tersebut, masyaraat kehilangan kerangka etis dan kultural yang sebelumnya membatasi perilaku ekonomi, politik, dan sosialnya sehingga perilaku mereka cenderung menjadi permisif dan liar. Kondisi lingkungan budaya yang seperti itu amat kondusif bagi munculnya krisis politik dan sosial.

**Konsolidasi Fiskal serta Stabilisasi Politik, Sosial, dan Keamanan**

Depresiasi rupiah selama krisis moneter telah menaikkan jumlah utang luar negeri pemerintah dalam rupiah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis. Utang negara itu diperparah oleh program penjaminan dan rekapitalisasi perbankan sebesar Rp 650 triliun. Dengan kondisi utang seperti itu, aprosiasi RAPBN 2002 untuk pembayaran bunga mencapai 26 persen dari total apropriasi (nomor dua terbesar setelah apropriasi untuk daerah melalui dana perimbangan).

APBN juga menanggung beban subsidi, subsidi dapat mengurangi daya stimulasi ekonomi bagi pertumbuhan dan pemerataan. Subsidi juga menjadi sumber inefisiensi ekonomi yang serius karena mendistorsi struktur harga, serta menjadi sumber ketidakadilan sosial karena distorsi distribusi pendapatan yang ditimbulkannya.

Selain itu, subsidi menempatkan pemerintah pada posisi yang serba salah. Jika subsidi dikurangi atau dihapuskan, pemerintah akan berhadapan dengan inflasi dan protes keras dari masyarakat yang selama lebih dari tiga dekade sudah dimanjakan oleh subsidi. Di sisi lain, jika subsidi dibiarkan, akan muncul disparitas harga dalam dan luar negeri, yang mendorong dapat mendorong terjadinya penyelundupan, dan pada gilirannya akan menyebabkan kelangkaan pasok di dalam negeri, serta dampak akhirnya adalah inflasi. Ada pun kebijakan pemerintah yang diambil mengenai subsidi akan dampak berakibat pada inflasi.

Beban APBN ikut diperparah oleh korporat dan lembaga keuangan yang sebagian besar sedang berada dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Satuan Tugas Prakarsa Jakarta. Sebagai akibat dari buruknya keadaan korporat dan lembaga keuangan tersebut, mereka membutuhkan restrukturisasi utang atau modal, yang tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Keadaan sebaliknya terjadi pada usaha kecil dan menengah (UKM) yang rata-rata mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena UKM telah terbiasa dengan kondisi pasar yang kompetitif sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan, pergeseran, dan gejolak lingkungan politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) dan ekonomi makro. Kondisi ini merupakan konfirmasi kebenaran tesis ekonomi pasar kompetitif dan tesis bahwa ekonomi kerakyatan yang *sustainable* adalah yang menerapkan system ekonomi pasar kompetitif.

Terlepas dari konteks permasalahan polsoskam dan ekonomi makro, APBN perlu diperbaiki melalui suatu program konsolidasi jangka menengah, yang sudah dimulai sejak tahun anggaran 2000 dengan target konsolidasi. Target konsolidasi pada tahun anggaran 2004 akan dicapai dengan kondisi sebagai berikut: (i) defisit sebesar nol persen dari PDB, (ii) rasio pajak (*tax ratio*) sebesar 16 persen dari PDB, (iii) rasio utang terhadap PDB (*dept to GDP ratio*) kurang dari 60 persen, serta (iv) jika terpaksa menerapkan kebijakan defisit, prioritas sumber pembiayaannya adalah dari dalam negeri.

Dari semua kondisi di atas, yang diperlukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi adalah upaya untuk menyelamatkan semua pihak. Untuk itu perlu dilakukan: (i) stabilitasi, harmonisasi, dan normalisasi kerangka besar polsoskam, (ii) stabilisasi ekonomi makro, (iii) konsolidasi fiscal menuju APBN yang *sustainable*, dan (iv) jika terpaksa menerapkan kebijakan defisit, prioritas sumber pembiayaannya adalah dari dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan program-program IMF, terdapat beberapa kekurangan di dalamnya, yaitu: pertama, program IMF tidak mencakup perbaikan wadah polsoskam yang kondisinya rusak parah. Perbaikan wadah polsoskam memang tidak mungkin diberikan oleh IMF karena tidak termasuk di dalam wilayah kompetensinya. Di samping itu, polsoskam adalah wilayah yang terlalu sensitif untuk dipertontonkan kepada IMF yang merupakan pihak asing sehingga pemerintah harus memperbaikinya sendiri. Kedua, dalam menstabilkan dan menormalkan ekonomi makro, IMF terlalu mengandalkan instrument moneter, sementara banyak permasalahan ekonomi makro merupakan permasalahan di sector riil yang lebih cocok di tanda tangani dengan instrument fiscal atau polsoskam. Ketiga, restrukturisasi korporat di BPPN dan *Jakarta Initiative Task Force* berjalan alot sekali. Hal ini sebagian disebabkan oleh lemahnya instrument hukum dan *governance*.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, pemerintah meminta bantuan IMF untuk melakukan restrukturisasi sector keuangan melalui program penjaminan dan stabilisasi ekonomi makro dengan menggunakan instrument fiscal dan moneter. Langkah-langkah yang dilakukan pada awalnya mampu menstabilkan kondisi makro ekonomi Indonesia, tetapi dengan adanya beban psikologis berupa ancaman kerusuhan polsoskam, tindakan yang dilakukan IMF tidak efektif.

Politik di Indonesia tidak stabil karena reformasi telah menggeser posisi tawar berbagai elemen penting dalam masyarakat. Pemilu 1999 telah menggeser posisi tawar berbagai partai politik. Posisi tawar militer melemah terhadap sipil. Posisi tawar daerah menguat terhadap pusat. Posisi tawar lembaga leglislatif menguat terhadap lembaga eksekutif seiring dengan menguatnya posisi tawar masyarakat di hadapan negara. Posisi tawar kelas sosial bawah menguat terhadap kelas menengah, dan itu menerangkan anomaly di pasar tenaga kerja yang telah diungkapkan di muka.

Biang dari permasalahan sosial adalah kesenjangan ekonomi yang berlebihan. Kecemburuan yang ditimbulkannya menjadi kuat sekali karena batas-batas peta kemakmuran ekonomi itu berimpit besar dengan batas-batas peta ras dan peta agama. Batas-batas primordial tidak mungkin untuk dihapuskan tanpa cara mengatasi permasalahan sosial adalah bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi terlalu lebar.

Keberhasilan dalam stabilisasi, harmonisasi, dan normalisasi polsoskam amat penting artinya bagi stabilisasi dan normalisasi ekonomi. Jika berhasil, pasar yang sudah tidak lagi takut akan bayang-bayang polsoskam akan sensitive terhadap rangsangan-rangsangan stabilisasi ekonomi makro. Apabila stabilisasi polsoskam dan ekonomi makro mulai menunjukkan hasil nyata, kepercayaan pasar dan investor akan berangsur pulih.